

## STRATEGI DAN KEBIJAKAN INOVASI PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI ROTAN DI KALIMANTAN TENGAH

*Saputera*

Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya

### **Abstract**

*Rattan is a lot of natural resources contribute to local revenue and foreign exchange, but in reality there is no concrete data on the potential and spread, so that the population status is not known in nature. On the other hand the destruction of forests (deforestation) increased from year to year and continuous harvesting dikuawatirkan would threaten the sustainability of the species-pseies plant cane in it. Utilization of plant cane for every / regions differ both in terms of species and their usefulness. But cane cultivation by the Central Kalimantan is limited to two types, namely economical rattan (*Calamus trachycoleus*) and garden (*Calamus caesius*). Efficient Rattan is a type that are excellent farmers in the three districts because of its ease of cultivation, high production, and the growth pace.*

*Problems cane in Central Kalimantan now is a) price rattan always fluctuate, b) as a result of the export ban PP rattan prices decline sharply, c) the limitations of the market, d) information on the type of quality rattan demand by consumers, e) information on the type of products processed from raw rattan demand by consumers, f) limitations of Human Resources to process rattan to produce finished materials of rattan, g) limited capital an opportunity to build a rattan processing industry, and h) the cultivation and processing of rattan in farm level is still traditional.*

*Thus, the government needs to find a strategy and innovation policy proper, dealing with some aspect of the other aspects of culture, finance, infrastructure, information, business, partnerships, licensing opportunities, promotion of trade and institutional support. Strategy and policy innovation to do is a) to develop a general framework that is conducive to innovation and business rattan, b) institutional strengthening and support of science and technology / R & D, 3) develop the ability to absorption by rattan processing industry, c) cultivate collaboration for innovation and increase the diffusion of innovations from R & D results, d) promote a culture of innovation, e) to cultivate and strengthen the integrity of the system of innovation and the promotion of national and regional industry cluster, and f) alignment with global developments.*

**Keywords : rattan, strategy, policy, innovation**

### **1. Pendahuluan**

Keaneka ragaman flora di hutan tropis di Kalimantan, dan khususnya Kalimantan Tengah sangat tinggi yang tercermin dari kekayaan jenis tumbuh-tumbuhan, yang berupa pohon-pohonan, semak belukar, perdu, tanaman merambat, epiphyt, lumut, jasad renik, ganggang dan jamur. Dari jenis-jenis tumbuhan hutan tersebut ada kelompok jenis tumbuhan dari family falmae, yaitu

rotan yang peran manfaat sebenarnya sudah dapat dirasakan khasiatnya bagi penduduk setempat, mauapun dalam perdagangan lokal, nasional dan internasional.

Rotan merupakan sumberdaya alam yang banyak sekali memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan devisa negara, namun kenyataannya belum ada data yang konkret mengenai potensi dan penyebarannya, sehingga belum diketahui status populasinya di alam. Disisi lain kerusakan hutan (*deforestation*) yang meningkat dari tahun ketahun dan pemanenan yang terus menerus dikhawatirkan akan mengancam kelestarian spesies-pseies tumbuhan rotan di dalamnya.

Sebagai komoditi yang dapat diandalkan untuk penerimaan Negara, Rotan telah dipandang sebagai komoditi perdagangan hasil hutan bukan kayu yang cukup penting bagi Indonesia. Produk rotan ini juga telah menambah penerimaan ekspor unggulan selain minyak dan gas bumi serta dapat disejajarkan dengan penerimaan ekspor utama lainnya seperti kopi, karet dan minyak sawit. Disaming itu, inustri rotan juga memenuhi persyaratan pengembangan ekspor bukan migas, karena (a) memanfaatkan sumberdaya alam negeri, (b) dapat memeperbesar nilai tambah, (3) dapat bersaing di pasar dunia, dan (d) dapat menyerap tenaga kerja (Erwinsyah, 1999).

Menurut Saputera dan Rajudinnor, (2008) di Kalimantan Tengah, hampir semua kabupaten memiliki potensi rotan. Namun yang paling banyak habitat rotan yaitu di kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Kapuas. Banyak masyarakat lokal yang sangat tergantung dengan komoditas rotan ini, terutama sebagai bahan baku untuk pembuatan kerajinan dan ekspor bahan baku dari rotan itu sendiri. Sumber daya rotan di provinsi Kalimantan Tengah sungguh sangat besar.

Pemanfaatan tumbuhan rotan bagi setiap/daerah memiliki perbedaan baik dilihat dari segi spesies maupun kegunaannya. Hal ini tentu saja menimbulkan daya tarik bagi berkembangnya usaha pemanfaatan tumbuhan rotan yang menguntungkan dari sisi ekonomi, karena ada peluang diversifikasi produk, namun kondisi ini juga merangsang meningkatnya pemanenan tumbuhan rotan dari alam dan sekaligus memperluas skala geografis permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelestarian pemanfaatannya. Namun budidaya rotan yang dilakukan oleh masyarakat di Kalimantan Tengah hanya terbatas pada dua jenis ,yaitu rotan irit (*Calamus trachycoleus*) dan taman (*Calamus caesius*). Rotan irit merupakan jenis yang menjadi primadona petani di tiga kabupaten tersebut karena kemudahan dalam budidaya, produksi yang tinggi, dan kecepatan dalam pertumbuhan. Hanya beberapa petani yang tertarik untuk menanam rotan taman, karena produksi yang dihasilkan lebih rendah, walaupun secara kualitas produk rotan ini lebih baik dari rotan irit, namun dari segi harga tidak terlalu jauh berbeda. Dalam 1 ha produksi rotan irit mencapai 7 ton, sedangkan rotan taman hanya 3 ton. Hingga kini cukup sulit memperoleh data sekunder untuk mendukung kegiatan kajian ini, sehingga kajian kegiatan perusahaan hulu hilir ini sebagai langkah awal dalam penyusunan informasi dunia rotan di provinsi Kalimantan Tengah.

Akan tetapi meskipun ekspor bahan baku rotan telah dibatasi dengan tujuan meningkatkan industri rotan dalam negeri namun kenyataannya ekspor meubel

rotan juga tetap mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2005 mencapai 128 ribu ton dengan nilai 1347 juta US\$ maka pada tahun 2009 turun menjadi 58 ribu ton dengan nilai 188 juta US\$. Demikian juga halnya jumlah perusahaan rotan yang semakin sedikit dimana per Desember 2009 sebanyak 220 perusahaan (43%) gulung tikar, 208 perusahaan (40%) dalam kondisi buruk dan 136 perusahaan (17%) bertahan (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2010). Kebijakan pemerintah seharusnya menggali potensi kesejahteraan yang belum termanfaatkan dari sumberdaya rotan sehingga seluruh potensi *welfare* dari sumberdaya rotan termanfaatkan, bukan mengalihkan kesejahteraan yang sudah tergali dari satu kelompok ke kelompok lainnya (Lisman Sumardjani, 2010).

## 2. Potensi Rotan di Kalimantan Tengah

Kabupaten Katingan merupakan salah satu Kabupaten penghasil rotan terbesar di Kalimantan Tengah, memiliki bentangan hutan alam yang luas dan kaya berbagai macam jenis pohon dan hasil hutan ikutan lainnya (rotan) yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi. Ada beberapa jenis rotan yang terdapat di Kabupaten Katingan. Dari 128 jenis rotan yang telah teridentifikasi digunakan secara lokal dan diperdagangkan secara komersial di Indonesia. Jenis rotan yang paling banyak dari 7 marga yang ada adalah marga *Calamus* yaitu 73 jenis, sedangkan pada marga yang lain masing-masing *Daemonorops* 31 jenis, marga *Korthalsia* 14 jenis, marga *Plectocomia* 2 jenis, marga *Plepcomiopsis* 3 jenis, marga *Myrialepis* 2 jenis dan marga *Ceratolobus* sebanyak 3 jenis. Dari beberapa marga yang disebutkan diatas, marga *Calamus* dan marga *Daemonorops* merupakan marga yang bernilai ekonomis tinggi (Disperindag, Kabupaten Katingan, 2012)

Untuk kebun rotan Taman/Sega dan Irit di Kalimantan Tengah sendiri diperkirakan seluas 1,5 juta Ha dengan potensi 1,4 juta ton/tahun yang tersebar di Kabupaten/Kota dengan rincian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Potensi Hasil Perkebunan Rotan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Perkiraan Luas Kebun (Ha)	Perkiraan Potensi Produksi (Ton/Tahun)
1.	Palangka Raya	25.000	30.000
2.	Sukamara	55.000	50.000
3.	Kotawaringin Barat	55.000	50.000
4.	Lamandau	55.000	50.000
5.	Seruyan	180.000	170.000
6.	Kotawaringin Timur	100.000	100.000
7.	Katingan	325.000	300.000
8.	Gunung Mas	55.000	50.000
9.	Pulang Pisau	55.000	50.000
10.	Kapuas	55.000	50.000
11.	Barito Timur	55.000	50.000
12.	Barito selatan	325.000	300.000
13.	Barito Utara	105.000	100.000
14.	Murung Raya	55.000	50.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>

Sumber : Laporan Tahunan Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah 2011.

Dari data Tabel 1 tersebut di atas Kabupaten Katingan memiliki luas kebun sekitar 325.000 ha dengan potensi produksi sebesar 300.000 ton/tahun atau sekitar 21.42% dari total produksi Kalimantan Tengah. Daerah lain yang dekat dengan Kabupaten Katingan adalah Kabupaten Kota Waringin Timur yang memiliki luas kebun rotan 100.000 ha dengan perkiraan produksi rotan 100.000 ton/tahun dan Kabupaten Kapuas seluas 55.000 ha dengan potensi produksi 50.000/tahun. Di samping itu ketiga Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Kotawaringin Tinur, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Lamandau tersebut belum memiliki industri pengolahan rotan. Dengan demikian bila di lihat dari letak industri pengolahan rotan di Kabupaten Katingan yang cukup strategis, maka dimungkinkan kedua Kabupaten tersebut termasuk pensuplai bahan baku untuk kebutuhan industri pengolahan rotan di Kabupaten Katingan.

Walaupun demikian untuk menjaga kelangsungan peningkatan ketersediaan bahan baku perlu diantisipasi beberapa hal antara lain a) agar tidak terjadi alih fungsi lahan budidaya rotan menjadi lahan tanaman perkebunan menjadi perkebunan kelapa sawit, b) perlu dilakukan penyuluhan tentang teknologi budidaya rotan oleh instansi pemerintah terkait, agar hasil produksi sesuai dengan yang diharapkan dan c) perlu antisipasi terhadap kebakaran yang terjadi pada musim kemarau pada lahan kebun rotan dengan melakukan penyuluhan kepada petani rotan agar selalu membersihkan kebun rotan secara kontinyu (Rusan at al. 2010).

Hasil produksi rotan selain dijual ke industri besar di pulau jawa, juga dimanfaatkan sebagai bahan baku anyam-anyaman oleh beberapa anggota masyarakat. Jenis kerajinan anyam-anyaman tersebut sangat bervariasi dan beragam bentuknya, seperti Tas, Topi, Tikar, Keranjang, dan lain sebagainya. Perjalanan usaha kelompok tersebut ternyata tidak berjalan lama seperti yang diharapkan, karena Penampung lokal (PERUSDA) tidak mampu mengembangkan akses pemasaran dengan baik. Pada waktu itu pemasaran hanya terbatas pada seberapa banyak jumlah dan jenis pesanan dari konsumen saja. Akibat dari itu, ketika permintaan semakin berkurang dan upaya PERUSDA untuk pengembangan pasar sangat lemah, maka usaha anyam-anyaman yang dijalankan oleh kelompok masyarakat tersebut menjadi tidak terorganisir dengan baik dan sampai pada saat sekarang ini tidak berjalan sama sekali. Usaha dilakukan secara individual dan untuk pesanan lokal dari masyarakat sekitar saja. Selama ini jalur pemasaran, dari petani rotan dijual kepada pedagang pengumpul dalam bentuk rotan basah, kemudian pedagang pengumpul melakukan proses pengolahan selanjutnya dan menjualnya dalam bentuk rotan kering dengan berbagai ukuran dan kualitas kepada industri pengolahan rotan dan pedagang besar yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Porter (2003) beberapa kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam sebuah industri, yaitu: pemasok (*Supplier*), pembeli (*Buyers*), barang substitusi (*Substitutes*), pendatang baru potensial (*Potential Entrance*), dan para pesaing industri, yaitu persaingan di antara perusahaan yang ada dalam industri (*Industry Competitors*).

### **3. Permasalahan Rotan di Kalimantan Tengah**

Rotan sebagai primadona petani dan industri saat ini sudah menjadi persoalan petani dan pengrajin, persoalan pertama; setelah dibukanya proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kabupaten Kapuas membawa dampak yang cukup besar terhadap kebun-kebun rotan petani, penggusuran, kebakaran kebun utamanya, sehingga saat ini tanaman rotan yang tersisa sangat sedikit. Persoalan kedua, tata niaga rotan sedikit membingungkan masyarakat penghasil rotan dan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah.

Masalah utama yang hingga kini belum terselesaikan adalah kepentingan kegiatan pengusahaan hulu hilir rotan. Persoalan tersebut pernah dilontarkan oleh Lisman Sumardjani (2010) dalam *Roadmap Mencapai Kelestarian Rotan untuk Pemanfaatan dan Kesejahteraan Bangsa* menyatakan bahwa "Ada dua kelompok kepentingan utama yang mempunyai aspirasi berbeda, yakni kelompok hulu dan kelompok hilir. Kelompok hulu terdiri dari petani dan pengolah rotan asalan menjadi rotan setengah jadi. Kelompok hilir terdiri dari industri pengolah rotan setengah jadi menjadi rotan olahan jadi. Kelompok hulu memiliki preferensi tidak ada larangan ekspor rotan dalam segala bentuk, asal, dan jenis, sementara kelompok hilir memiliki preferensi adanya pembatasan ekspor rotan asalan dan setengah jadi tetapi membebaskan ekspor rotan olahan".

Kebijakan penting pertama yang ditetapkan pemerintah berkaitan dengan perdagangan rotan adalah larangan ekspor rotan asalan dari seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 492/Kp/VII/79 tanggal 23 Juli 1979. Pertimbangan penetapan kebijakan ini adalah (a) sudah mulai dikenalnya hasil olahan rotan Indonesia di pasaran dunia; (b) upaya meningkatkan pertumbuhan industri ekspor barang jadi rotan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan penerimaan devisa Negara; dan (c) memelihara supply rotan. Seperti telah dikemukakan, kebijakan ini mengubah komposisi ekspor rotan Indonesia, yaitu penurunan ekspor rotan mentah sampai menjadi nol dan peningkatan ekspor rotan setengah jadi dan barang jadi rotan.

Pertumbuhan barang jadi rotan membutuhkan bahan baku, yaitu rotan setengah jadi. Sementara itu, pada saat bersamaan, rotan setengah jadi masih diperkenankan untuk diekspor. Akibatnya, terjadi persaingan antara pemenuhan bahan baku industri dan ekspor. Untuk mempercepat pertumbuhan industri ekspor barang jadi rotan, maka ditetapkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 274/Kp/X/86 tanggal 7 Oktober 1986 yang kemudian disempurnakan menjadi Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 1907/Kp/VI/88 tanggal 30 Juni 1988. Kebijakan ini berisi larangan ekspor rotan mentah dan rotan setengah jadi yang berdampak kepada penurunan ekspor barang jadi Negara-negara yang mengimpor rotan setengah jadi, seperti Singapura dan Hongkong.

Larangan ekspor rotan mentah dan setengah jadi ini kemudian dicabut dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 179/Kp/VI/92 Tanggal 8 Juni 1992. Pada tahun 2009, Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan pada 11 Agustus 2009 yang intinya memperketat ekspor rotan asalan dan setengah jadi, yaitu; (a) Rotan W/S dari jenis rotan Taman/Sega (*Calamus caesius*) dan Irit (*Calamus trachycoleus*) dengan diameter 4 mm sampai dengan 16 mm; dan (b)

Rotan Setengah Jadi dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit, dan Rotan Setengah Jadi bukan dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit dalam bentuk poles halus, kulit dan hati. Sedangkan Rotan yang dilarang diekspor meliputi; (a) Rotan Asalan; (b) Rotan W/S dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit yang diameternya dibawah 4 mm dan diatas 16 mm; dan (c) Rotan W/S bukan dari jenis rotan Taman/Sega dan Irit. Keputusan Menteri Perdagangan pada tahun 2009 kemudian dirubah menjadi Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 28/M-DAG/PER/10/2011 tentang Pelarangan Ekspor Rotan.

Terlepas dari berbagai regulasi yang diterapkan Pemerintah, hingga saat ini industri rotan Indonesia baik hulu dan hilir masih mengalami penurunan kinerja yang diakibatkan berbagai hal. Data Depertemen Perdagangan menunjukkan bahwa semenjak tahun 2004 hingga 2009, volume bahan baku rotan mengalami penurunan. Apabila tahun 2004 volume ekspor rotan mencapai 33.970 ton, maka pada tahun 2009 volumenya hanya 27.863, 59 ton. Dengan demikian tercatat bahwa sejak tahun 2004 hingga 2009 penurunan ekspor bahan baku rotan sebesar 18%.

Alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sawit menyebabkan bahan baku rotan juga menjadi berkurang. Belum lagi harga rotan yang diperoleh petani saat ini masih berfluktuasi sehingga menyebabkan keengganan petani rotan berusaha tani tanaman rotan. Disisi lain pembelian rotan saat ini masih bersifat monopoli, sehingga harga rotan yang diperoleh petani dibeli dengan harga semau pengumpul. Nilai tambah hasil pengolahan rotan saat ini masih dinikmati provinsi lain. Ini merupakan sebagian gambaran umum yang dialami oleh petani rotan kita di Kalimantan Tengah saat ini. Bila dilihat dari aspek budidaya rotan saat ini kelihatan adanya ketidak jelasan tugas dari fungsi instansi yang menangani masalah budidaya rotan yaitu antara dinas kehutan dan perkebunan, dengan demikian dipandang perlu adanya penataan ijin penggunaan lahan yang tepat sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan tanaman rotan menjadi tanaman lainnya, dan pembinaan yang intensif terhadap petani oleh berbagai instansi terkait

Dari aspek pendanaan petani rotan pada khususnya masih lemah sehingga untuk pengembangan budidaya dan usaha kerajinan dalam bentuk usaha kerajinan rumah tangga susah berkembang. Dengan demikian dipandang perlu untuk memperkuat sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha produktif khususnya perkebunan rotan dan industri kerajinan rotan agar petani rotan dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringan sehingga dapat diakses oleh subsistem hulu dan hilir perusahaan rotan. Disamping itu dengan tingkat pengetahuan petani yang rendah dalam mengakses perbankan maka diharapkan peran pemerintah dan perbankan untuk memberikan kemudahan kepada petani untuk memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, mudah, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan membantu pelaku usaha hulu dan hilir rotan mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lain yang disediakan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan pemerintah.

Kemitraan usaha antara petani dan pengusaha sangat kurang, padahal aspek kemitraan ini sangat penting dalam pengembangan rotan di daerah. Dengan

demikian dipandang perlu mendorong dan mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar, mewujudkan kemitraan antara usaha ekonomi produktif skala mikro, kecil dan menengah dan skala Usaha Besar. Menurut Gray at al, (1992) perlu dorongan agar terjadinya hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha hulu dan hilir rotan skala mikro, kecil dan menengah, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha hulu dan hilir pada skala mikro, kecil dan menengah dan Usaha Besar, serta mengembangkan kerjasama meningkatkan posisi tawar bagi usaha hulu dan hilir rotan skala mikro, kecil dan menengah. Disamping itu perlu mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dan mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemutusan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha hulu dan hilir tanaman rotan. Begitu juga dengan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu agar lebih disederhanakan, dan membebaskan biaya perizinan usaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Bila dilihat dari aspek kesempatan berusaha dipandang perlu adanya peran pemerintah pusat maupun daerah dalam pengembangan rotan, sehingga usaha ini bukan saja sebagai usaha sampingan tetapi dipandang sebagai usaha yang menjanjikan. Walaupun saat ini lokasi sentra industri kerajinan rotan sudah ada di beberapa Kabupaten tetapi masih belum di Kabupaten lain. Begitu juga lokasi perkebunan rotan rakyat, dan lokasi pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Dengan demikian dipandang perlu untuk dilakukan pembenahan sampai kepada menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha hulu dan hilir rotan skala mikro, kecil dan menengah di sub-sektor perdagangan ritel, mencadangkan biaya dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun, menetapkan bidang usaha yang di cadangkan untuk usaha hulu rotan skala mikro, kecil dan menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk skala Usaha Besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha hilir rotan skala mikro, kecil dan menengah, melindungi usaha hulu dan hilir rotan skala mikro, kecil dan menengah, mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha hulu dan hilir rotan skala mikro dan kecil melalui pengadaan secara langsung, memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dari segi aspek promosi dagang dan dukungan kelembagaan ditingkat hulu sampai hilir pengembangan rotan di Kalimantan Tengah masih kurang tertata dengan baik. Dengan demikian dipandang perlu pengembangan dan perluasan pasar mengenai suatu produk, baik dari segi kualitas, manfaat, maupun harga sehingga mudah disentuh pasar dan dapat berkembang secara berkesinambungan, menarik minat konsumen dalam jumlah tertentu dalam upaya pemasaran hasil produksi, sehingga para pelaku usaha dapat mengembangkan dan meningkatkan baik hasil produksi maupun jumlah dan kualitas produk sesuai dengan permintaan pasar, dan untuk menjangkau akses pasar yang luas melalui berbagai jaringan informasi yang tersedia. Sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan aspek dukungan kelembagaan diperlukan upaya yang ditujukan untuk mengembangkan

dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi yang sejenis lainnya sebagai lembaga penunjang pengembangan skala mikro, kecil dan menengah. Selanjutnya pengembangan usaha ditujukan sebagai upaya pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha hulu dan hilir rotan skala mikro, kecil dan menengah dalam bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, dan teknologi. Pengembangan usaha bidang produktif dan pengolahan, dilakukan dengan cara meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha hulu dan hilir rotan skala mikro, kecil dan menengah, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha hilir rotan skala mikro, kecil dan menengah, mendorong penerapan standarisasi dalam produksi dan pengolahan usaha hulu dan hilir tanaman rotan, dan meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi usaha hilir tanaman rotan skala mikro, kecil dan menengah.

Permasalahan lain yang dihadapi ditingkat petani rotan di Kalimantan Tengah saat ini antara lain a) harga rotan yang senantiasa mengalami fluktuasi, b) akibat adanya PP larangan ekspor harga Rotan mengalami penurunan yang sangat tajam, sehingga para petani mengalami banyak kerugian terutama dari tingkat penghasilan, c) keterbatasan pasar, d) informasi mengenai jenis kualitas rotan yang diminati oleh konsumen, e) informasi mengenai jenis produk olahan dari bahan baku rotan yang diminati oleh konsumen, f) keterbatasan Sumber daya Manusia untuk mengolah rotan menjadi produk bahan jadi rotan, g) peluang permodalan yang terbatas untuk membangun industri pengolahan rotan dan h) budidaya dan pengolahan rotan di tingkat petani bersifat tradisional.

Disisi lain pada tingkat Industri seperti di Surabaya dan Cirebon hanya memiliki kapasitas untuk menampung rotan sekitar 30%, sementara jika sudah terpenuhi kapasitas tampungnya, maka harga rotan ditawarkan dibawah standar. Tidak jarang pembeli lokal mengalami kerugian akibat olah pengusaha tersebut. Menurut Saputera et al. (2011), sebagai akibat dari menurunnya harga rotan ditingkat petani, buruh dan pembeli lokal, maka dampak yang muncul saat ini di Kalimantan Tengah adalah a) adanya upaya pengalihan usaha dari petani rotan menjadi petani karet /sawit, b) sebagian besar kebun rotan telah dialih fungsi menjadi lahan kebun karet/sawit, c) petani kesulitan mencari peluang usaha lain sebagai sumber pendapatan keluarga, yang mengakibatkan akan meningkatnya jumlah keluarga miskin, d) adanya penyeludupan rotan ke Kalimantan Barat, e) meningkatnya jumlah pengangguran, f) motivasi petani rotan menurun secara drastic, g) akibat kerugian yang dialami oleh pembeli local sebagai dampak permainan pengusaha pada tingkat industri, maka harga rotan akan drastis turun pada level petani oleh pembeli lokal untuk menutup kerugian yang dialami sebelumnya.

Harapan petani rotan Kalimantan Tengah saat ini adalah a) perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah harga rotan dengan kata lain harga rotan semestinya dinaikan secara signifikan untuk terwujudnya kesejahteraan petani rotan, b) peninjauan kembali PP mengenai larangan ekspor bahan mentah rotan, c) membuka akses pasar seluas-luasnya, baik untuk bahan mentah, setengah jadi dan bahan jadi, d) membuka peluang permodalan untuk



pengembangan usaha rotan, e) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal pengolahan bahan baku rotan menjadi bahan jadi yang memiliki nilai jual yang tinggi baik tingkat lokal, nasional maupun global, dan f) penyediaan pabrik rotan yang menguntungkan semua pihak baik petani, buruh, pembeli lokal maupun pengusaha industri rotan dan pemerintah. g. Tidak ada akses pemasaran yang luas untuk hasil kerajinan anyaman rotan oleh kelompok masyarakat, h) tidak ada penampung tetap yang mampu menampung hasil kerajinan secara berkesinambungan, i) harga hasil produk kerajinan rotan yang sangat rendah dan tidak stabil, dan j) berkurangnya minat dan motivasi masyarakat pengrajin untuk menjalankan usaha kerajinan anyam-anyaman.

#### **4. Strategi dan Kebijakan Inovasi Pengembangan Agroindustri Rotan di Kalimantan Tengah**

##### **Strategi dan Kebijakan Pengembangan Agroindustri Rotan**

Dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan diatas, pemerintah daerah dipandang perlu mencari strategi dan kebijakan inovasi yang tepat, berhubungan dengan beberapa aspek antara lain :

Aspek budidaya rotan. 1) perlu ada kejelasan dari pemerintah daerah tentang tugas dari instansi yang menangani masalah budidaya rotan antara dinas kehutanan dan perkebunan, 2) perlu adanya penataan ijin penggunaan lahan yang tepat sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan tanaman rotan menjadi tanaman lainnya, dan 3) pembinaan intensif terhadap petani dari berbagai instansi terkait

Dalam konteks aspek pendanaan, penumbuhan iklim usaha kondusif di tujukan untuk 1) memperkuat sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha produktif (perkebunan rotan dan industry kerajinan rotan) untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, 2) memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringan sehingga dapat diakses oleh subsistem hulu dan hilir perusahaan rotan, 3) memberikan kemudahan memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, mudah, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan 4) membantu pelaku usaha hulu dan hilir rotan mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lain yang disediakan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan pemerintah.

Aspek sarana dan prasarana.1) meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi dari sektor perkebunan tanaman rotan yang dijalankan oleh para petani rotan dan pelaku usaha industry kerajinan rotan, 2) meningkatkan akses keterjangkauan wilayah-wilayah potensial, dan 3) mendorong akses keterjangkauan pasar.

Aspek Informasi Usaha. 1) meningkatkan jaringan informasi usaha sebagai upaya untuk perluasan akses pasar, 2) pengembangan dan perluasan jaringan informasi usaha, sehingga para pelaku subsistem hulu dan hilir perusahaan rotan dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan kualitas hasil produksi sesuai dengan permintaan pasar dan kebutuhan konsumen, dan 3) menyediakan berbagai bentuk jaringan komunikasi, seperti forum komunikasi subsistem hulu dan hilir perusahaan rotan, sehingga pelaku ekonomi

pada sector tersebut dapat mengetahui perkembangan baik harga, kualitas, jenis kemasan maupun jumlah kebutuhan pasar dan konsumen diperlukan.

Aspek kemitraan. 1) mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, kecil, menengah dan Usaha Besar, 2) mewujudkan kemitraan antara usaha ekonomi produktif skala mikro, kecil dan menengah dan skala Usaha Besar, 3) mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha hulu dan hilir rotan skala mikro, kecil dan menengah, 4) mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha hulu dan hilir pada skala mikro, kecil dan menengah dan Usaha Besar, 5) mengembangkan kerjasama meningkatkan posisi tawar bagi usaha hulu dan hilir rotan skala mikro, kecil dan menengah, 6) mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dan 7) mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemutusan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha hulu dan hilir tanaman rotan.

Aspek Perijinan Usaha. 1) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dan 2) membebaskan biaya perizinan usaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Aspek kesempatan berusaha. 1) menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi. Lokasi sentra industri kerajinan rotan, lokasi perkebunan rotan rakyat, dan lokasi pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, 2) menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha hulu dan hilir rotan skala mikro, kecil dan menengah di sub-sektor perdagangan ritel, 3) mencadangkan biaya dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun, 4) menetapkan bidang usaha yang di cadangkan untuk usaha hulu rotan skala mikro, kecil dan menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk skala Usaha Besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha hilir rotan skala mikro, kecil dan menengah, 5) melindungi usaha hulu dan hilir rotan skala mikro, kecil dan menengah, 6) mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha hulu dan hilir rotan skala mikro dan kecil melalui pengadaan secara langsung, 7) memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan 8) memberikan bantuan konsultan hukum dan pembelaan untuk aspek promosi dagang

Aspek promosi dagang. 1) pengembangan dan perluasan pasar mengenai suatu produk, baik dari segi kualitas, manfaat, maupun harga sehingga mudah disentuh pasar dan dapat berkembang secara berkesinambungan, dan 2) menarik minat konsumen dalam jumlah tertentu dalam upaya pemasaran hasil produksi, sehingga para pelaku usaha dapat mengembangkan dan meningkatkan baik hasil produksi maupun jumlah dan kualitas produk sesuai dengan permintaan pasar.

Aspek Dukungan Kelembagaan. 1) meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha hulu dan hilir rotan skala mikro, kecil dan menengah, 2) memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha hilir rotan skala mikro, kecil dan menengah, 3) mendorong penerapan standarisasi dalam produksi dan pengolahan usaha hulu

dan hilir tanaman rotan dan 4) meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha hilir tanaman rotan skala mikro, kecil dan menengah.

### **Strategi dan Kebijakan Inovasi Yang Dapat Dilakukan Dalam Pengembangan Rotan Di Kalimantan Tengah**

Menurut Urip Santoso (2012), Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan sebuah pola pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Melalui pendekatan pembangunan SIDa ini, keseluruhan pelaku, lembaga, jaringan, kemitraan, aksi, proses produksi dan kebijakan yang mempengaruhi arah perkembangan, kecepatan dan difusi inovasi serta proses pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai pembangunan sebuah daerah. Sistem Inovasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran.

Beberapa yang menjadikan prinsip dasar pengembangan strategi inovasi daerah meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka jangka panjang, strategi Inovasi Daerah yang menjadi agenda prioritas daerah dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah, Strategi inovasi daerah merupakan kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah, Berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan Menetapkan tujuan yang jelas dan capaian yang rasional. Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik / holistik, ketidaklinieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi.

Strategi dan kebijakan inovasi pengembangan rotan di Kalimantan Tengah dapat dilakukan sebagai berikut yaitu 1) mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis rotan, 2) memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang, 3) mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri pengolahan rotan (Perusda), 3) menumbuh kembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi dari hasil litbang, 4) mendorong budaya inovasi, 5) menumbuh kembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah, dan 6) penyelarasan dengan perkembangan global.

### **5. KESIMPULAN**

Dari uraian diatas adapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Permasalahan rotan di Kalimantan Tengah saat ini adalah a) harga rotan yang senantiasa mengalami fluktuasi, b) akibat adanya PP larangan ekspor harga rotan mengalami penurunan yang sangat tajam, c) keterbatasan pasar, d) informasi mengenai jenis kualitas rotan yang diminati oleh konsumen, e) informasi mengenai jenis produk olahan dari bahan baku rotan yang diminati oleh konsumen, f) keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk mengolah rotan menjadi produk bahan jadi rotan, g) peluang permodalan

- yang terbatas untuk membangun industri pengolahan rotan, dan h) budidaya dan pengolahan rotan di tingkat petani masih bersifat tradisional.
2. Dengan demikian pemerintah perlu mencari strategi dan kebijakan inovasi yang tepat, berhubungan dengan beberapa aspek antara lain aspek budidaya, pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perijinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.
  3. Strategi dan kebijakan inovasi yang dapat dilakukan adalah a) mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis rotan, b) memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang, c) mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri pengolahan rotan, d) menumbuh kembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi dari hasil litbang, e) mendorong budaya inovasi, f) menumbuh kembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah, dan g) penyelarasan dengan perkembangan global.

### **Daftar Pustaka**

- Rusan, A.S, Bambang S.L, Eddy,L. Muses E. Saputera. Ewal,H. dan Palentina. 2010. Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kerjasama Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dengan Universitas Palangka Raya.
- Disperindag, Prov. Kalteng. 2011. Laporan Tahunan Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012. Palangka Raya.
- Disperindag, Kabupaten Katingan. 2012. Laporan Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Katingan. Provinsi Kalimantan Tengah.
- BPS. 2012. Kabupaten Katingan dalam Angka. Kerjasama BPS Kabupaten Katingan dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Porter, Michael E. 2003. Strategi Bersaing. Erlangga. Jakarta.
- Gray C, Simanjuntak, Maspaitela dan Varley. 1992. Pengantar Evaluasi Proyek. Pt.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saputera dan Rajudinnor. 2008. Penyusunan Peta Panduan Pengembangan Sentra IKM Kerajinan Anyaman di Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas. Kerjasama Pusat Penelitian Perdesaan dan Ekonomi Kerakyatan Lemlit Unpar dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Saputera, Ahim S.Rusan, Dedi Takari, Lelo Sintanii. 2011. Studi Kelayakan Industri Pengolahan Rotan Di Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Teknik Industri Trisakti. Vol 3: 241-250.
- Lelo Sintani, Saputera, Bambang M, Muses E,. 2012. Kajian Subsistem Hulu dan Hilir Pengusahaan Rotan di Kalimantan Tengah, Laporan Penelitian Kerjasama BAPEDA Provinsi Kalimantan Tengah dengan Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya. Palangka Raya. Pp.215.

Lisman Sumardjani. 2010) *Roadmap Mencapai Kelestarian Rotan untuk Pemanfaatan dan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta.

Urip Santoso. 2012. Peranan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam Percepatan Pembangunan Daerah (Oripsatoso.wordpress.com).